HARIAN UMUM NusaBali

Semua Daerah di Bali Dapatkan Opini WTP

★ Sempat *Disclaimer*, Bangli Akhirnya Raih Opini Tertinggi

Bupati Bangli Made Gianyar didampingi Ketua DPRD Ngakan Kutha Parwata saat terima WTP, Jumat (2/6).

DENPASAR, NusaBali

Untuk kali pertama sepanjang sejarah, seluruh daerah di Bali mendapat opini 'tertinggi' Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016. Bahkan, Pemkab Bangli yang sempat dapat

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

PRESTASI DAERAH DI BALI ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN 6 TAHUN TERAKHIR

LEVEL	OPINI DARI BPK ATAS AUDIT LKPD TAHUN ANGGARAN						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pemprov Bali	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pemkab Klungkung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
Pemkab Bangli	WDP	WDP	WDP	Disclaimer	WDP	WDP	WTP
Pemkot Denpasar	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pemkab Badung	WDP	WTP	WTP	Tidak Wajar	WTP	WTP	WTP
Pemkab Buleleng	Disclaimer	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Pemkab Tabanan	WDP	WDP	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	WTP
Pemkab Jembrana	Tidak Wajar	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Pemkab Gianyar	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Pemkab K'asem	Disclaimer	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

KETERANGAN:
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (nilai tertinggi atas audit laporan keuangan)
WDP : Wajar dengan Pengecualian (nilai tertinggi kedua atas audit laporan keuangan)
Disclaimer : Boleh dikata nilai merah

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta didampingi Wa Ketua DPRD Ida Ayu Gayatri terima WTP, Jumat (2/

Semua Daerah di Bali Dapatkan Opini WTP

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

opini Disclaimer atas audit LKPD tahun anggaran 2013, kini juga ikut naik kelas ke opini WTP.

Opini WTP untuk 9 kabupaten/kota se-Bali telah diserahkan secara bersamaan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (2/6) pagi. Predikat WTP ini diserahkan kepada Bupati Bangli Made Gianyar, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Jembrana Putu Artha, Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, dan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra. Kepala daerah didampingi para Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing.

Sedangkan predikat WTP untuk Pemprov Bali sudah lebih dulu diserahkan BPK Perwakilan Bali kepada Gubernur Made Mangku Pastika dan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, Rabu (31/5) lalu. Bagi Pemprov Bali, ini merupakan predikat WTP keempat secara beruntun. Sebelumnya, Pemprov Bali dapat opini WTP atas audit LKPD tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015. Sebelumnya, Pemprov Bali tiga kali secara beruntun mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas audit LKPD tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012.

Khusus Klungkung dan Karangasem, mereka mendapat opini WTP kedua secara beruntun dari BPK setelah audit LKPD tahun anggaran 2015. Sementara bagi Buleleng, Badung, Tabanan, Jembrana, dan Gianyar, ini opini WTP ketiga secara beruntun setelah audit tahun anggaran 2014 dan 2015. Hanya Kota Denpasar yang meraih WTP lima kali secara beruntun sejak audit LKPD tahun anggaran 2012, 2013, 2014, dan 2015. Sebaliknya, Pemkab Bangli di bawah Bupati Made Gianyar baru kali pertama dapat opini WTP atas audit LKPD tahun anggaran 2016 ini. Setahun lalu, Bangli menjadi satu-satunya daerah yang tidak naik kelas, karena tetap terpaku dengan opini WDP atas audit LKPD tahun anggaran 2015. ***(Selengkapnya lihat boks).***

Bagi Bangli, ini prestasi membanggakan, karena baru kali pertama dalam sejarah mereka berhasil meraih opini tertinggi WTP dari BPK. Sebelumnya, Bangli selalu dapat predikat WDP sejak audit LKPD tahun anggaran 2011. Bahkan, Bangli sempat dapat opini Disclaimer (rapor merah) dari BPK atas audit LKPD tahun anggaran 2013.

Tak heran jika Bupati Made Gianyar mengungkapkan terimakasih kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bangli atas raihan opini WTP tersebut. "Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama. Terimakasih kepada para pegawai yang sudah bekerja siang dan malam dengan dikomandoi Sekda Bangli dan seluruh leading sector," ujar Bupati Made Gianyar yang didampingi Wabup Sang Nyoman Sedana Arta, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, dan Sekda Bangli IB Gede Giri Putra seusai terima opini WTP, Jumat kemarin.

Bupati Made Gianyar mengatakan, kebahagian tersebut setimpal dengan kerja keras selama ini. "Lebih baik mendapatkan nilai kecil hasil kerja keras dan upaya sendiri," katanya. Menurut Bupati Bangli dua kali periode ini, capaian WTP tentu menjadi semangat bagi pemerintah ke depan untuk semakin berbenah. "Kelemahan-kelemahan yang ada harus segera diperbaiki," lanjut politisi PDIP asal kawasan pegunungan Kintamani, Bangli ini.

Sedangkan Ketua DPRD Bangli, Ngakan Kutha Parwata, mengatakan keberhasilan daerahnya meraih opini WTP tidak terlepas dari kerja sama semua pihak. Kutha Parwata berharap pencapaian ini menjadi awal yang lebih baik untuk Bangli. "Kami berharap ini bisa dipertahankan bahkan ke depan menjadi lebih bagus. Mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada memperolehnya," terang politisi senior PDIP asal Tembuku, Bangli ini.

Sementara itu, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menyampaikan rasa bangganya atas capaian opini WTP buat kedua kalinya secara beruntun. "Opini WTP yang telah diraih dua kali secara berturut-turut ini menandakan integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas kinerja telah meningkat dan semakin membaik," ujar Bupati Suwirta, yang kemarin menerima opini WTP di Kantor BPK RI Perwakilan Bali dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Klungkung dari Fraksi Hanura, Ida Ayu Made Gayatri.

Bupati Suwirta berharap de gan opini WTP ini, akan sem kin memacu seluruh jajaran pemkab Klungkung untuk beker lebih baik lagi, sesuai ketentu dan perundang-undangan ya berlaku. "Kita akan berupaya m nindaklanjuti beberapa catat yang direkomendasikan ol BPK," jelas Bupati Klungku Pertama asal Kawasan Sebera Nusa Penida ini.

Sedangkan Wakil Ketua DPI Klungkung, Ida Ayu Made Gayat mengapreasiasi kinerja ekseku yang telah sukses mempertahan an opini WTP tahun ini. Sebab, menunjukkan keberhasilan d kinerja, meskipun ada bebera catatan yang mesti dibenahi depannya.

Menurut Gayatri, bebera hal yang perlu mendapat pe benahan di Klungkung, anta lain, menyangkut insfrastrukt dan aset. "Itu bisa kita perba bersama-sama ke depann Kami di parlemen tetap ak melakukan kontrol," jelas Srikar Hanura ini saat dikonfirmasi N saBali, Jumat malam.

Sementara, Kepala BPK Perwakilan Bali, Yulindra Tri K sumo, mengatakan berdasark hasil pemeriksaan, semua k bupaten/kota se-Bali menda opini WTP. "Ini sekaligus men dakan seluruh pemerintah d rah se-Provinsi Bali mulai d tingkatan provinsi sampai deng kabupaten/kota, laporan keu gan untuk tahun 2016 me peroleh WTP," jelas Yulindra.

nat,e,wa,nar

Edisi : Sabtu, 3 Juni 2017

Hal : 1

HARIAN UMUM
NusaBali

Gianyar Raih Opini WTP Ke-3

GIANYAR, NusaBali

Pemkab Gianyar kembali meraih opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP ini untuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho diterima Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Made Togog, Jumat, (2/6), di auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Penyerahan LHP diberikan kepada para ketua DPRD dan bupati/walikota se – Provinsi Bali. Seluruh kabupaten/kota se Bali memperoleh WTP. Dengan raihan ini, Kabupaten Gianyar secara berturut – turut mendapat predikat WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2014 dan 2015.

Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyampaikan, LHP atas laporan keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian. Yakni, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang memuat Opini Pemeriksaan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016, dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan, opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Gianyar adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten/kota, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016, memperoleh opini WTP," kata Yulindra Tri Kusumo Nugroho.

Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan, bahwa predikat opini WTP yang diraih Kabupaten Gianyar ini merupakan hasil kerja keras semua pihak baik eksekutif dan legislatif. Selain itu, berkat dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik. Dengan raihan WTP ini, diharapkan dapat memotivasi semua pihak untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan berturut – turut meraih WTP kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tetapi menjadikannya sebuah motivasi untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik ke depannya. Sehingga Gianyar menjadi lebih baik lagi," terang Mahayastra.

Wakil Ketua DPRD Gianyar I Made Togog mengaku bangga atas pencapaian yang diraih Pemkab Gianyar. Dirinya berharap dengan predikat opini WTP tiga kali berturut – turut ini membuat jajaran di lingkungan Pemkab Gianyar terlena. Tetapi dengan apa yang diraih saat ini menjadi motivasi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transaparan dan akuntabel. **@ lsa**

• IST

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho (3 depan kanan) berpose usai menyerahkan plakat Opini WTP kepada Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra (tengah) didampingi Wakil Ketua DPRD Gianyar I Made Togog (kiri), Jumat, (2/6), di auditorium Kantor BPK Perwakilan Bali.

Edisi : Sabtu, 3 Juni 2017
Hal : 6

HARIAN UMUM
NusaBali

Klungkung Raih WTP Kedua Kali

● IST

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Klungkung Ida Ayu Made Gayatri, saat menerima WTP di Kantor BPK Perwakilan Bali di Denpasar, Jumat (2/6).

SEMARAPURA, NusaBali

Pemkab Klungkung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bali. WTP kali ini merupakan raihan yang kedua kali secara berturut turut sejak tahun 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemkab Klungkung tahun anggaran 2016 itu diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali Drs Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta disaksikan Wakil Ketua DPRD Klungkung Ida Ayu Made Gayatri serta para kepala daerah dan ketua DPRD se-Provinsi Bali, Jumat (2/6), di Aula Kantor BPK di Denpasar.

Kepala BPK RI Perwakilan Bali Drs Yulindra Tri Kusumo Nugroho mengatakan sesuai pasal 20 UU No 15 Tahun 2014 dan demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK, maka BPK mengharapkan kepada seluruh Pemkab/kota menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Raihan yang cukup membanggakan pada acara tersebut karena seluruh kabupaten kota se-Bali memperoleh opini WTP yang sama. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam kesempatan itu menyampaikan rasa bangganya atas capaian ini. Kata dia, WTP yang telah diraih secara berturut turut menandakan integritas, kredibilitas dan akuntabilitas kerja Pemkab Klungkung telah meningkat dan semakin membaik.

Bupati berharap penghargaan ini dapat semakin memacu seluruh jajaran di Pemkab Klungkung untuk bekerja lebih baik sesuai perundang undangan yang berlaku. Pihaknya berharap para jajaran segera menindaklanjuti beberapa catatan yang direkomendasikan oleh BPK. @ wa

Edisi : Sabtu, 3 Juni 2017
Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

Tabanan *Hattrick* WTP, Bupati Ingatkan Tidak Lupa Diri

● IST

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti didampingi Wakil Ketua DPRD Tabanan Ni Nengah Sri Labantari menerima WTP dari BPK RI Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (2/6).

TABANAN, NusaBali

Pemkab Tabanan *hattrick* atau tiga kali beruntun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Bali untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016. Opini WTP dikuatkan dalam piagam yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti di Denpasar, Jumat (2/6).

Bupati Eka Wiryastuti sangat bersyukur atas keberhasilan Pemkab Tabanan meraih predikat WTP. "Bersyukur sudah pasti, tapi keberhasilan ini jangan sampai membuat kita menjadi malas, sombong atau lupa diri," pesan Bupati Eka. Baginya, WTP justru menjadi alarm atau peringatan untuk selalu mengevalusai kinerja agar tepat guna dan bermanfaat serta memenuhi aturan administrasi perundang-undangan yang berlaku tentang keuangan. Ditambahkan, pertanggungjawaban atas laporan keuangan harus bersifat *sustainable* yakni harus berkelanjutan.

Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Yulindra Tri Kusumo mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, opini BPK atas laporan Keuangan TA 2016 pada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Bangli adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Ini sekaligus menandakan seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali mulai dari tingkatan provinsi sampai dengan kabupaten/kota, laporan keuangan untuk tahun 2016 seluruhnya memperoleh WTP," jelasnya.

Secara umum BPK masih menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kelemahan SPI antara lain; proses penyusunan laporan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, antara lain masih terdapat penatausahaan aset yang belum tertib dan masih terdapat pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai," terangnya. Sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang No 15 Tahun 2004 demi efektifnya hasil pemeriksaan, BPK berharap Pemkab/Pemkot se-Bali segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. **@ k21**

Edisi : Sabtu, 3 Juni 2017

Hal : 7

HARIAN UMUM NusaBali

Pemkot Pertahankan Predikat WTP Lima Kali Berturut-turut dari BPK RI

★ Wawali Jaya Negara Terima Piagam WTP dan LHP TA 2016

DENPASAR, NusaBali

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkot Denpasar Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan ini menjadi keberhasilan Pemkot Denpasar mempertahankan opini WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2012. Penyerahan piagam WTP dan Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) Tahun Anggaran 2016 dilakukan pada Jumat (2/6) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho diterima Wakil Walikota I GN Jaya Negara bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Mariyana Wandira di kantor BPK RI Perwakilan Bali.

Penyerahan LHP dilaksanakan secara bersamaan yang menghadirkan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali yang dilanjutkan dengan pengumuman opini BPK atas hasil pemeriksanaan keuangan daerah oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho. "Berdasarkan hasil pemeriksanaan, opini BPK atas Laporan Keuangan TA 2016 pada sembilan kabupaten/kota yang seluruhnya memperoleh WTP," ujar Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho usai menyerahkan LHP kepada masing-masing kepala daerah dan pimpinan DPRD.

• IST

WAKIL Walikota I GN Jaya Negara bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Mariyana Wandira menerima piagam WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho, Jumat (2/6) di kantor BPK RI Perwakilan Bali.

Lebih lanjut dikatakan, LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian. Yakni LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2016 yang memuat opini pemeriksaan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan. Demi efektifnya hasil pemeriksanaa BPK, sesuai ketentuan dalam pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengharapkan seluruh kabupaten/kota dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima.

Wakil Walikota I GN Jaya Negara menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPK RI beserta jajarannya yang selama ini terus membimbing dan mengarahkan. Sehingga pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta pelaksanaan program pembangunan di Kota Denpasar dapat terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan Kota Denpasar juga tidak terlepas dari kwalitas sumber daya manusianya. Karenanya kedepan Pemkot Denpasar tidak henti-hentinya memohon bimbingan kepada BPK RI dan jajarannya untuk terus melakukan pembinaan, sehingga keberhasilan ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dikatakan dengan keberhasilan meraih opini WTP ini dapat menjadikan semangat bagi aparatur di Pemkot Denpasar sehingga nantinya dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

Sementara Wakil Ketua DPRD, Wayan Mariyana Wandira mengatakan DPRD Kota Denpasar sebagai legislator bersama Pemkot Denpasar dengan prestasi WTP yang telah diraih berturt-turut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Sehingga WTP tidak serta-merta sebagai hadiah, namun kedepan lebih ditingkatkan lagi mengacu pada aturan-aturan yang ada, serta sesuai dengan program kerja Pemkot Denpasar. "Ini bentuk keseriusan Pemkot Denpasar dengan hasil WTP sebagai prestasi bagi Kota Denpasar dalam pengelolaan keuangan daerah," ujarnya. @ **cr63**

Edisi : Sabtu, 3 Juni 2017

Hal : 3

HARIAN UMUM NusaBali

Badung Raih WTP Tiga Kali Berturut

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya secara berturut, 2014, 2015, dan 2016 dari pemerintah pusat. Pemkab Badung kembali raih WTP dari Kementerian Keuangan RI atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Penghargaan tersebut diterima Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho, Jumat (2/6), di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan integritas antara pemerintah/kota dengan BPK Perwakilan Provinsi Bali. Acara tersebut dihadiri bupati/walikota dan DPRD se-Bali serta instansi pemerintah se-Bali.

Yulindra Tri Kusumo Nugroho dalam sambutannya mengatakan, penghargaan ini tidak hanya sebagai prestasi administratif. Pencapaian ini harus benar-benar mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel yang benar-benar berorientasi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2016 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali semua mendapatkan WTP. Ini sekaligus menandakan seluruh pemerintah se-Provinsi Bali telah bekerja keras dan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ujarnya.

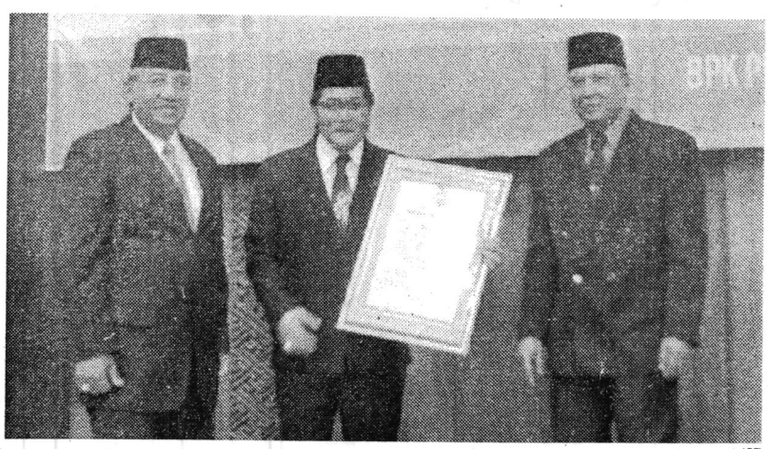

● IST

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta (tengah) didampingi Ketua DPRD Badung I Putu Parwata (kiri) menerima opini WTP dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Jumat (2/6).

Bupati Giri Prasta mengatakan opini WTP ini merupakn hasil kerja keras Pemkab Badung beserta perangkat daerah. "Dengan meraih opini WTP menjadi cambuk untuk tetap bekerja pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu seluruh program bersih dari segala kesalahan dari tangan-tangan kotor yang dapat merugikan orang banyak. Hal ini menjadi catatan yang sangat penting. Karena harapan masyarakat Badung cukup besar dengan opini WTP ini seyogyanya tidak ada lagi korupsi di Pemkab Badung," tegasnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Badung Ni Putu Suryanithi menambahkan, diraihnya opini WTP oleh Pemkab Badung ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pegawai. "Semoga kinerja ini bisa terus dipertahankan bahkan lebih baik lagi untuk membangun Badung yang kredibel dan berkualitas," tandasnya. **@ asa**

Edisi : Sabtu 3 Juni 2017

Hal : 2